



# GURINDAM KEPRI

BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jl. Raja Isa Batam Center, Batam 29432 Telp. (0778) 468575 Fax. (0778) 468580

## Merajut Kembali Kebangkitan BPK

**Batam** – *Tagline* tersebut digelorkan langsung oleh Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam *keynote speech* nya pada pembukaan acara Sosialisasi Penguatan Implementasi Nilai-nilai Dasar BPK untuk Pelaksana BPK pada Perwakilan Wilayah Barat, yang diselenggarakan di Kota Batam, pada tanggal 2 November 2017. Acara yang dikoordinasikan bersama oleh Inspektorat Utama BPK, Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK dan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tersebut mengambil tema “Penguatan Implementasi Nilai-nilai Dasar BPK Dalam Rangka Mewujudkan Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat”. Digelar di *Ballroom* Hotel Best Western Premier Panbil, acara diikuti oleh para kepala perwakilan dan para pejabat fungsional pemeriksa dari 16 perwakilan BPK di wilayah barat.

Semangat untuk merajut kembali kebangkitan BPK disuarakan mengingat kondisi terkini dimana terdapat banyak tantangan dan hambatan yang dapat mengganggu kinerja dan kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa. “Setidaknya ada dua tantangan yang menjadi perhatian saya yang perlu kita refleksikan bersama agar tidak menjadi hambatan dan mengganggu reputasi dan kredibilitas proses dan hasil BPK ke depan, yaitu tantangan yang datang dari publik berupa pandangan atau opini masyarakat, dan tantangan yang datang dari internal berupa pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai”, beber Ketua BPK dalam pidatonya.

Acara yang dimulai pada pukul 08.30 WIB tersebut turut dihadiri oleh para Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Inspektur Utama, dan para Staf Ahli serta para Pejabat di lingkungan BPK RI lainnya. Diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Inspektur Utama BPK, Mahendro Sumardjo, acara dilanjutkan dengan *keynote speech* dan pemukulan gong oleh Ketua BPK RI, yang menandai dibukanya acara hari itu. BPK.

Kemudian dalam Sesi Panel I, tampil berturut-turut sebagai pembicara adalah Anggota II BPK yang merangkap sebagai Ketua MKKE, Agus Joko Pramono, yang membawakan materi dengan topik “Penguatan Sistem Pengendalian Internal”, kemudian Anggota V BPK yang merangkap sebagai Anggota MKKE, Isma Yatun, yang membahas tentang “Sistem Pengendalian Mutu Kinerja Pemeriksaan untuk BPK Perwakilan Wilayah Barat: Tantangan dan *Key Success Factors*”, dan sebagai penutup pada sesi tersebut adalah Anggota MKKE, I Gde Pantja Astawa, yang berbicara mengenai “Kode Etik dan Konsekuensi Penerapannya oleh Pemeriksa BPK”. Bertindak sebagai moderator dalam sesi tersebut adalah Staf Ahli BPK Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, Novy G. A. Pelenkahu.

Selanjutnya dalam Sesi Panel II Anggota MKKE lainnya yang menjadi pembicara adalah Zaki Baridwan yang menengahkan materi yang berjudul “Membentuk Budaya Organisasi yang Mendukung Terciptanya Integritas, Independensi, dan Profesionalisme yang Kuat” dan Jusuf Halim yang mengangkat tema “Pentingnya Pemahaman Terhadap Standar bagi Pemeriksa BPK”. Yang menjadi moderator dalam sesi tersebut adalah Staf Ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Blucer W. Rajagukguk.

Sementara itu di hari kedua, narasumber yang tampil sebagai pembicara dalam sesi panel adalah Ketua Komite Teknis Manajemen Risiko BSN, Antonius Alijoyo, yang mengangkat tema “Manajemen Risiko bagi Institusi dan pemeriksa BPK” dalam paparannya, dan kemudian dilanjutkan oleh *Partner of Ernst & Young*, Stevanus A.B.P. Sianturi, yang berbicara mengenai “*Fraud Risk Assessment*”, dan yang menjadi pembicara terakhir adalah Tortama AUI, I Nyoman Wara, yang menengahkan tema berkaitan dengan “Kasus *Fraud* dalam kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara”. Yang menjadi moderator dalam sesi akhir tersebut adalah Staf Ahli BPK Bidang Manajemen Risiko, Abdul Latief.



# Laporan Keuangan BPK Kepri Masuk Tiga Besar Terbaik se-Kepri

Batam – Laporan Keuangan Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meraih peringkat ketiga sebagai LK K/L tingkat UAPPA-W Tahun 2016 lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Joko Agus Setyono, dalam suatu *event* penganugerahan sekaligus Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 kepada KPPN Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri.

Penghargaan diberikan kepada 5 satuan kerja yang berkinerja terbaik dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 dengan 3 indikator penilaian yang meliputi kualitas data laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan. Selepas menerima penghargaan ini, Joko Agus mengaku bangga dengan prestasi yang diraih oleh instansi yang dipimpinnya. “Penghargaan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa BPK tidak hanya profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, tetapi juga profesional dalam menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah”, terangnya. Namun dibalik itu, diakui Joko Agus peringkat ketiga terbaik belumlah cukup, “Tahun depan harus lebih baik lagi, bahkan seharusnya kita jadi nomor satu”, tegasnya lagi. Acara yang digelar pada tanggal 28 Agustus 2017 di Hotel CK Tanjungpinang tersebut turut pula dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Heru Pudyo Nugroho, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, Gusti Raizal, dan pejabat-pejabat penting lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



## Pemuda Indonesia Berani Bersatu



**Batam** – Tema tersebut diangkat dalam Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang Ke-89 Tahun 2017. Pidato dibacakan oleh Inspektur Upacara, Joko Agus Setyono, dalam upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada hari Senin, 30 Oktober 2017.

Dalam upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dan diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tersebut, Inspektur Upacara mengamanatkan agar pemuda Indonesia berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemuda Indonesia juga harus berani melawan ego kesukuan, kedaerahan, dan keagamaan masing-masing. Kemudian yang paling penting, pemuda Indonesia harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia adalah segala-galanya, jauh di atas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan. Keberanian untuk bersatu tersebut menjadi semakin relevan untuk digelorakan kembali dalam kondisi bangsa Indonesia yang saat ini begitu mudah berpecah belah, berselisih paham, saling mengutuk satu dengan yang lain, dan saling menebar fitnah dan kebencian.

“Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu Bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir,” tegas Inspektur Upacara mengutip salah satu pernyataan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno. Menutup amanatnya, Inspektur Upacara menghimbau sekali lagi agar pemuda Indonesia mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menghentikan segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Sudah saatnya pemuda Indonesia melangkah pada tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Salam Pemuda...!!!**

# Forum Manajer IKU

## Semester I 2017 di BPK Kepri

Batam - Sebagai penunjuk arah dan strategi dalam mencapai visi dan misi BPK, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2016-2020, yang salah satu implementasinya berupa pembentukan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK). SIMAK ini membantu untuk menerjemahkan visi dan strategi BPK ke dalam sejumlah Indikator Kerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis pada level Badan, Eselon I, maupun satuan kerja.

Untuk melaksanakan dan memenuhi IKU tersebut, dilakukan pengukuran dan pemantauan sebagai upaya untuk penyelarasan dan penyempurnaan berkelanjutan atas strategi yang telah ditetapkan, yaitu salah satunya melalui kegiatan Forum Manajer IKU (FMI). Kegiatan wajib untuk para Manajer IKU yang diadakan pada setiap semester ini mengumpulkan seluruh Manajer IKU dari setiap satuan kerja yang ada di BPK.



Kegiatan FMI untuk Semester I Tahun 2017 diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dibuka oleh Kepala Direktorat PSMK, Dali Mulkana, serta dihadiri oleh Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Bernardus Dwita Pradana, dan Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, Maulana Ginting, acara berlangsung selama dua hari pada 13-14 September 2017.

Dalam pembukaan acara, Dali Mulkana menyampaikan harapannya bahwa kegiatan rutin FMI ini dapat meningkatkan kinerja setiap satuan kerja yang ada di BPK. Senada dengan hal itu, Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Joko Agus Setyono, dalam sambutannya sebagai tuan rumah, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada masing-masing satuan kerja tentunya berbeda-beda, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan FMI, dapat memberikan masukan-masukan berharga dalam mengatasi permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja BPK.



Diskusi Panel Sosialisasi Kode Etik BPK di Batam



Kegiatan Pengarahan Wakil Ketua dan FGD Bidang Hukum

# G A L E R I F O T O



Upacara Hari Pahlawan 2017



Para Pejabat Struktural BPK Kepri di Upacara Sumpah Pemuda

# BPK Kepri Tuan Rumah Kegiatan FGD Penanganan Gugatan terhadap LHP BPK

## PENGARAHAN WAKIL KETUA BPK DAN FGD PENANGANAN GUGATAN TERHADAP LHP BPK

Batam, 11 September 2017



Batam - Dalam proses pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK tidak bisa terlepas dari resiko hukum atas penerbitan laporan hasil pemeriksaannya. Resiko berupa gugatan hukum, baik secara perdata melalui Pengadilan Negeri, maupun secara administrasi negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu wujud ketidakpuasan *stakeholder* LHP BPK.

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman yang komprehensif pada Pemeriksa dan Subbagian Hukum BPK Perwakilan dalam pemberian pendapat hukum dan *Legal Opinion*, serta penanganan perkara di pengadilan baik secara teori maupun praktek, Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum Ditama Binbangkum BPK bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang mengusung tema "Penanganan Gugatan terhadap LHP BPK".

Diselenggarakan pada 11 September 2017 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan *FGD* dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Kaditama Binbangkum dan Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau serta diikuti oleh para Kasubbag Hukum dan 1 orang staf Subbagian Hukum pada 11 Kantor Perwakilan, yakni Perwakilan Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Perwakilan Kepulauan Riau sendiri sebagai tuan rumah.

Dimulai pada pukul 08.30 WIB, kegiatan *FGD* berkenan dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar. Dalam pembukaannya, Wakil Ketua mengharapkan agar *FGD* yang diadakan dapat memberikan pemahaman bagi para Kasubbag dan staf di Subbagian Hukum di Perwakilan dalam menyatukan

langkah dan pemahaman mengenai penanganan gugatan terhadap LHP BPK. Selain itu kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan fungsi koordinatif antara Ditama Binbangkum dengan Subbagian Hukum sebagai unit kerja hukum di perwakilan, dan sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan teknis khususnya dalam penanganan perkara di pengadilan.

Sementara itu, Kaditama Binbangkum, Nizam Burhanuddin, dalam laporannya menjelaskan bahwa untuk menghindari resiko hukum atas penerbitan LHP BPK, salah satu langkah preventif yang ditempuh adalah dengan melibatkan Ditama Binbangkum serta Kasubbag Hukum Perwakilan dalam pemeriksaan keuangan Negara. Peran yang dimaksud adalah pemberian pendapat hukum atas temuan pemeriksaan yang berindikasi unsur pidana dalam LHP.

Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Joko Agus Setyono sangat mendukung kegiatan *FGD* yang diinisiasi oleh Ditama Binbangkum tersebut. "Terlepas dari benar atau tidaknya gugatan *stakeholder*, menunjukkan kemungkinan masih adanya kelemahan-kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Apabila gugatan terbukti, dampaknya akan sangat merugikan dan berimbas pada menurunnya kredibilitas BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara," tegas Joko Agus, dalam sambutannya.